

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kawasan strategis sering membawa perubahan sosial bagi masyarakat di wilayah terdampak (Bappenas, 2020). Rempang *Eco-City* merupakan proyek industri dan pariwisata dalam skema Proyek Strategis Nasional di Kepulauan Riau (BP Batam, 2024). Pengembangan kawasan ini melibatkan relokasi masyarakat dari kampung lama di Pulau Rempang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Kondisi tersebut menjadikan partisipasi masyarakat penting dalam memastikan keberlanjutan sosial pembangunan (OECD, 2023).

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah Rempang *Eco-City*, yakni kawasan industri dan pariwisata yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah Kepulauan Riau (BP Batam, 2024). Proyek ini memiliki tujuan untuk menarik investasi serta membuka peluang kerja baru, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan dinamika sosial karena melibatkan proses relokasi warga dari enam belas kampung tua. Relokasi tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pendekatan administratif disertai dengan pemberian kompensasi berupa hunian bagi masyarakat yang terdampak (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024).

Pengembangan Rempang *Eco-City* mencakup area inti pengembangan industri serta kawasan relokasi masyarakat terdampak (BP Batam, 2024). Salah satu lokasi relokasi utama adalah kawasan transmigrasi Tanjung Banun di Pulau Rempang

(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Penelitian ini tidak membahas seluruh dinamika proyek PSN Rempang *Eco-City* secara keseluruhan. Fokus penelitian diarahkan pada masyarakat transmigran yang menempati kawasan relokasi Tanjung Banun. Rangkaian perkembangan kebijakan relokasi tersebut disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Progres Relokasi Warga Terdampak Proyek Rempang *Eco-City*

Periode	Keterangan Utama	Jumlah KK
Juni 2024	Warga terdampak teridentifikasi tahap I, Sebagian berkonsultasi, dan mendaftar relokasi.	961 KK terdampak 627 KK konsultasi 386 KK mendaftar 103 KK menempati hunian sementara
Agustus 2024	Progres peningkatan hunian sementara.	166 KK menempati hunian sementara
November 2024	Peningkatan jumlah hunian sementara dan awal hunian tetap.	220 KK menempati hunian sementara 42 KK menempati hunian tetap
Februari 2025	Penambahan KK menempati rumah baru.	58 KK menempati hunian tetap
Juni 2025	Total warga menempati rumah baru di Tanjung Banun terus bertambah.	106 KK menempati hunian tetap
November 2025	Progres terbaru relokasi menunjukkan peningkatan signifikansi jumlah penghuni rumah tetap.	125 KK menempati hunian tetap

Sumber: BP Batam (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 tersebut, proses relokasi warga terdampak Rempang *Eco-City* menunjukkan perkembangan positif dari pertengahan tahun 2024 hingga akhir 2025. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut belum sepenuhnya optimal karena sebagian warga masih menolak atau menunda relokasi hingga tahap akhir (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan *top-down* pemerintah dan kesiapan sosial masyarakat di lapangan. Oleh karena itu,

pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan pendekatan sosial berbasis partisipasi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal.

Selain persoalan sosial, proyek Rempang *Eco-City* juga terkait erat dengan aspek ekonomi masyarakat. Pembangunan kawasan industri dan pariwisata ini diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki kapasitas ekonomi yang memadai dalam mendukung pembangunan tersebut. Data resmi mengenai kondisi ketenagakerjaan wilayah Kepri disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator	Nilai
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,21%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,39%
Jumlah Penduduk Bekerja	1,04 juta orang
Persentase Pekerja di Sektor Industri Pengolahan	33,17%
Persentase Pekerja di Sektor Perdagangan & Jasa	47,26%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kepulauan Riau mencapai 70,21 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024). Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor industri pengolahan serta perdagangan dan jasa (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024). Struktur ekonomi tersebut menunjukkan ketergantungan wilayah terhadap investasi dan aktivitas industri. Berdasarkan konteks tersebut, Rempang *Eco-City* diposisikan pemerintah sebagai strategi memperkuat basis industri daerah (BP Batam, 2024).

Pembangunan kawasan Rempang *Eco-City* tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan penguatan daya saing ekonomi daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah mendorong pengembangan kawasan strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Kebijakan tersebut menempatkan pembangunan kawasan industri sebagai bagian dari strategi peningkatan investasi dan kesempatan kerja di daerah. Namun, keberhasilan pembangunan kawasan strategis juga bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan (OECD, 2023).

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam tata kelola pembangunan yang inklusif (OECD, 2023). David Wilcox mengemukakan lima tingkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat (Wilcox, 1994). Tingkatan tersebut meliputi *information*, *consultation*, *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community* (Wilcox, 1994). Kerangka tersebut digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Gunawan & Subadi, 2021).

Beberapa laporan menyebut adanya komitmen investasi besar dari investor asing dalam pengembangan Rempang *Eco-City* (ANTARA News, 2024). Pemerintah menargetkan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kepulauan Riau (BP Batam, 2024). Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi serta memperluas kesempatan kerja di wilayah Batam dan sekitarnya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi telah mencatat resistensi serta kekhawatiran warga lokal terkait pelaksanaan proyek Rempang *Eco-City* (WALHI, 2024). Komnas HAM menerima pengaduan terkait dampak PSN Rempang terhadap hak masyarakat setempat, termasuk isu hak atas tanah dan proses konsultasi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024). Laporan media dan LSM menyebut adanya benturan sosial serta protes warga yang menuntut pemenuhan hak dan kompensasi adil (Tempo, 2024). Perkiraan nilai investasi untuk pengembangan Rempang *Eco-City* mencapai sekitar Rp 381 triliun, dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja langsung sekitar 306 ribu orang. Dokumentasi berikut menunjukkan ketegangan antara agenda investasi dan perlindungan hak masyarakat selama fase pelaksanaan proyek (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025).

Gambar 1. 1 Konflik PSN Rempang *Eco-City*



Sumber: Tempo.co (2024)

Proyek pembangunan kawasan strategis, Rempang *Eco-City* menuntut pendekatan *development planning* yang partisipatif agar masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari transformasi sosial-ekonomi kawasan (BP Batam, 2024). Kebijakan pembangunan yang memasukkan partisipasi masyarakat tercatat dalam

dokumen perencanaan sebagai elemen untuk meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan proyek (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Laporan internasional dan kajian akademik menekankan bahwa proyek kawasan besar memerlukan mekanisme konsultasi dan kompensasi yang transparan bagi masyarakat terdampak (WALHI, 2024). Peraturan dan pedoman nasional menyatakan bahwa partisipasi warga merupakan bagian dari tata kelola proyek pembangunan yang baik.

Beberapa kajian dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PSN di Indonesia sering bersifat *top-down* dalam fase perencanaan dan implementasi (WALHI, 2024). Laporan Komnas HAM 2024 mencatat bahwa percepatan pelaksanaan PSN dapat menimbulkan risiko hak asasi manusia apabila proses konsultasi dan penyelesaian lahan tidak dijalankan sesuai standar (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024). Analisis akademik menyoroti bahwa karakter *top-down* ini sering menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara perencana proyek dan masyarakat lokal. Media independen juga melaporkan insiden konflik lokal terkait percepatan implementasi proyek tanpa keterlibatan warga yang memadai (Tempo, 2024).

Pendekatan partisipasi masyarakat menurut David Wilcox digunakan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Rempang *Eco-City*. Data dari dokumen resmi, laporan lembaga independen, dan observasi lapangan menjadi dasar analisis tingkat partisipasi warga. Analisis dilakukan dengan memetakan partisipasi pada lima tingkatan Wilcox, dari *information* hingga *supporting community* (Wilcox, 1994). Hasil kajian diharapkan memperjelas posisi partisipasi warga dalam kebijakan relokasi dan pembangunan kawasan.

Sebanyak 2.637 kepala keluarga (KK) di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau terdampak pembangunan Rempang Eco-City sebagai zona PSN (Kompas, 2025). Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa relokasi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan (ANTARA News, 2025). Meski demikian, beberapa warga tetap menolak pindah ke hunian tetap yang telah disiapkan (Kompas, 2025). Dokumentasi media menunjukkan warga mengungkapkan kekhawatiran terkait tanah warisan dan proses relokasi (Kompas, 2025).

Konflik lahan di Rempang tercatat sebagai salah satu faktor utama yang melemahkan partisipasi warga transmigran (Detik Finance, 2025). Menteri Transmigrasi menyatakan bahwa konflik lahan antara masyarakat lokal dan pengembangan PSN Rempang disebabkan ketidakjelasan hak atas tanah adat dan kompensasi (ANTARA News, 2025). Media melaporkan masyarakat menolak hunian relokasi sementara karena proses tidak transparan (Kompas, 2025). Ketidakjelasan ini menimbulkan persepsi warga bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas keputusan pembangunan yang memengaruhi hidup mereka (Arnstein, 1969).

Proses relokasi ke hunian sementara dan tetap menunjukkan bahwa belum semua warga memperoleh hak yang setara dalam menentukan lokasi dan desain hunian (ANTARA News, 2025). Media melaporkan biaya pembangunan rumah bagi warga terdampak mencapai Rp 153 juta per unit, namun kualitas dan keterlibatan warga masih dipertanyakan (Kompas, 2025). Beberapa KK belum menerima sertifikat hak milik (SHM) meski sudah menempati lokasi relokasi (Detik Finance, 2025). Hal ini memperkuat kesan bahwa warga belum memiliki

kontrol penuh atas aset mereka dalam konteks pembangunan kawasan (Arnstein, 1969).

Empiris menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan Rempang menurun karena mekanisme komunikasi dan partisipasi dianggap belum memadai (Kompas, 2025). Warga mendorong adanya proses konsultasi dan dialog yang memberikan ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2025). Ketika partisipasi bersifat simbolis, kepercayaan publik cenderung melemah dan pelaksanaan program menjadi kurang efektif (Arnstein, 1969).

Analisis pembangunan transmigrasi di kawasan strategis seperti Rempang menunjukkan bahwa partisipasi warga yang terbatas menjadi hambatan bagi keberlanjutan kawasan (Abd. Karim & Nurdin, 2020). Penelitian tersebut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat yang rendah dalam proses pengambilan keputusan seringkali menghambat keberhasilan pembangunan wilayah dan memperbesar potensi konflik sosial-ekonomi (Arnstein, 1969). Kajian menyebut bahwa mencapai *citizen power* memerlukan mekanisme yang benar-benar mendistribusikan kekuasaan ke masyarakat dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan masalah partisipasi warga sebagai alasan empiris utama yang perlu dianalisis mendalam.

Mengingat banyaknya hambatan empiris dalam praktik partisipasi masyarakat di Rempang, penelitian ini berfokus pada evaluasi sejauh mana masyarakat transmigran dilibatkan dalam proses perencanaan hingga implementasi pengembangan kawasan (KOMPAS ID, 2025). Analisis partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan kerangka tingkatan partisipasi David Wilcox, yang

meliputi tahapan pemberian informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, tindakan bersama, hingga dukungan terhadap keberlanjutan program. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memetakan posisi dan kualitas keterlibatan masyarakat transmigran dalam kawasan tributary Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Rempang, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Alfaris, 2024). Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi mekanisme penguatan partisipasi agar masyarakat transmigran tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek pembangunan yang memiliki kontrol terhadap perubahan di kawasan transmigrasi.

Idealnya, pengembangan kawasan transmigrasi menempatkan masyarakat sebagai mitra setara dalam seluruh proses pembangunan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Dokumen kebijakan nasional menegaskan bahwa pembangunan kawasan berkelanjutan menuntut keterlibatan masyarakat pada tingkat *partnership* atau *citizen power* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Prinsip ini bertujuan agar warga transmigran tidak sekadar menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan (Transmigrasi Go ID, 2025). Kebijakan resmi menekankan bahwa masyarakat lokal harus berperan sebagai “tuan rumah” pembangunan di wilayah mereka sendiri (Transmigrasi Go ID, 2025).

Namun, pelaksanaan pembangunan Rempang *Eco-City* menunjukkan adanya pendekatan *top-down* di berbagai aspek (Kompas, 2025). Liputan media melaporkan bahwa kebijakan relokasi dan transmigrasi lokal memicu konflik karena perencanaan yang dinilai kurang partisipatif (Kompas, 2025). Meskipun warga diinformasikan mengenai proyek, ruang mereka untuk memengaruhi

keputusan terbatas (ANTARA News, 2025). Analisis kebijakan menunjukkan bahwa model pelibatan warga belum mencapai tingkat *partnership* atau *citizen power* (Gunawan & Subadi, 2021).

Kesenjangan antara idealitas dan praktik partisipasi muncul ketika keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masih bersifat terbatas. Masyarakat terdampak seringkali hanya dilibatkan pada tahap penerimaan informasi atau konsultasi, sementara ruang pengambilan keputusan masih terbatas. Jika ditinjau menggunakan kerangka partisipasi David Wilcox, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berhenti pada tahap *information* dan *consultation*, dan belum berkembang menuju *deciding together* maupun *acting together*. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara kerangka partisipasi ideal dan praktik yang berlangsung dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City (Kompas, 2025; Nastiti & Masrurun, 2024).

Penelitian terdahulu umumnya membahas partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa atau wilayah perkotaan, sehingga kajian mengenai partisipasi masyarakat transmigran dalam pembangunan strategis nasional masih relatif terbatas (Cahayani, 2024). Beberapa studi lebih menekankan aspek penataan ruang dan pembangunan infrastruktur, sementara peran masyarakat sebagai aktor dalam keseluruhan proses pembangunan belum banyak dibahas (Putu Widya Darmayanti dkk., 2021). Selain itu, penelitian yang secara khusus memetakan tahapan partisipasi masyarakat transmigran menggunakan kerangka David Wilcox pada proyek strategis nasional juga masih terbatas (Nastiti & Masrurun, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang menelaah bagaimana bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat transmigran berlangsung dalam kawasan strategis nasional,

guna memperkaya diskursus mengenai perencanaan pembangunan berbasis partisipatif.

Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis tingkat dan tahapan keterlibatan masyarakat transmigran dalam proses perencanaan hingga implementasi pembangunan kawasan Rempang *Eco City* (Rahmaniar & Edison, 2024). Analisis partisipasi dilakukan dengan menggunakan kerangka tingkatan partisipasi David Wilcox yang membuat penelusuran keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberian informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, tindakan bersama, hingga bentuk dukungan terhadap pembangunan kawasan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya dengan melihat sejauh mana masyarakat transmigran dilibatkan dalam proses pembangunan yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka (Fitriani Lubis, 2023). Kajian ini juga diharapkan memberikan dasar empiris bagi pemahaman praktik pembangunan berbasis partisipasi di Indonesia, terutama pada kawasan strategis nasional berbasis transmigrasi (Cahayani, 2024).

Observasi dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa mekanisme relokasi dan pembangunan Rempang *Eco City* masih cenderung bersifat *top-down*, sehingga keterlibatan masyarakat transmigran berada pada tingkat partisipasi yang terbatas (Kompas, 2025). Faktor-faktor seperti konflik lahan, ketidakjelasan kompensasi, serta keterbatasan mekanisme konsultasi membatasi ruang masyarakat untuk terlibat secara lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif (Detik Finance, 2025). Jika ditinjau menggunakan kerangka lima

proses partisipasi David Wilcox, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak berlangsung pada tahap *information* dan *consultation*, sementara tahapan *deciding together* dan *acting together* belum berkembang secara optimal. Keterlibatan yang terbatas ini berimplikasi pada efektivitas dan legitimasi pembangunan kawasan, serta berpotensi memicu konflik sosial dan penurunan kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional (Abd. Karim & Nurdin, 2020; Cahayani, 2024).

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis proses partisipasi masyarakat transmigran dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang Eco City serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka lima proses partisipasi menurut David Wilcox (1994), yang mencakup pemberian informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, tindakan bersama, hingga dukungan masyarakat terhadap pembangunan kawasan, guna menelaah bagaimana keterlibatan masyarakat transmigran berlangsung dalam praktik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahannya dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* dapat diidentifikasi yaitu:

1. Proses partisipasi masyarakat transmigran masih berhenti pada tahap awal partisipasi. Keterlibatan masyarakat Rempang dalam pembangunan kawasan masih didominasi oleh pemberian informasi dan konsultasi,

sementara ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bersama (*deciding together*) dan tindakan kolektif (*acting together*) relatif terbatas. Kondisi ini tercermin dari proses sosialisasi relokasi yang cenderung bersifat satu arah dan minim ruang dialog. Akibatnya, masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai objek kebijakan pembangunan, bukan sebagai aktor yang terlibat dalam proses perencanaan kawasan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2025; Kompas, 2025).

2. Keterbatasan akses masyarakat terhadap kepastian hak dan mekanisme umpan balik dalam proses pembangunan juga menjadi persoalan penting. Sebagian warga terdampak belum memperoleh kepastian administratif terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada hunian relokasi sebagai pengganti hak atas tanah yang sebelumnya mereka miliki. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa mekanisme *supporting community* dalam kerangka partisipasi David Wilcox belum berjalan secara optimal. Akibatnya, masyarakat memiliki ruang yang terbatas untuk menyampaikan penilaian maupun masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan (ANTARA News, 2025).
3. Dominasi orientasi ekonomi dalam pembangunan kawasan terlihat dari meningkatnya investasi asing di Batam pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pengembangan Rempang *Eco-City* diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2025). Namun, pendekatan perencanaan yang cenderung top-down menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Dalam kerangka partisipasi David Wilcox,

kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak dilibatkan pada tahap *deciding together*, seperti dalam penentuan lokasi relokasi, bentuk kompensasi, serta desain kawasan permukiman baru. Selain itu, keterlibatan warga dalam tahap *acting together*, seperti pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan kawasan secara bersama, juga masih belum berkembang secara optimal.

4. Kesenjangan antara prinsip pembangunan partisipatif dan praktik kebijakan di lapangan terlihat dari terbatasnya ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kawasan. Secara normatif, pembangunan kawasan transmigrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme seperti konsultasi publik, musyawarah warga, serta keterlibatan dalam perencanaan permukiman dan kebijakan relokasi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Namun, praktik di Rempang *Eco-City* menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih lebih banyak berada pada tahap pemberian informasi dan konsultasi awal. Dalam kerangka partisipasi David Wilcox, kondisi ini menunjukkan bahwa tahapan *deciding together* dan *acting together*, seperti keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan relokasi maupun pelaksanaan program pembangunan kawasan, belum berkembang secara optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai identifikasi permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat masalah mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, yaitu:

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*;
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*;
2. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan teori yang selaras bagi riset-riset lain dengan fokus sejenis di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait, khususnya mengenai tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi kawasan transmigrasi. Manfaat lainnya adalah tersedianya referensi akademik baru pada bidang administrasi publik.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan proyek berskala nasional yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan kerangka lima proses partisipasi masyarakat menurut David Wilcox (1994) dalam konteks implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Melalui penyediaan bukti empiris, penelitian ini menganalisis bagaimana proses partisipasi masyarakat transmigran berlangsung, mulai dari tahap pemberian informasi dan konsultasi hingga pengambilan keputusan bersama, tindakan kolektif, dan dukungan masyarakat, serta implikasinya terhadap legitimasi, efektivitas, dan keberterimaan kebijakan pembangunan di tingkat lokal.
2. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat relevansi penggunaan pendekatan partisipasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia, serta menjadi referensi akademik untuk memperkaya model implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika konflik sosial, terutama pada wilayah yang mengalami transisi dari fungsi sosial-pemukiman menuju fungsi ekonomi-investasi sebagaimana terjadi pada Rempang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai bagaimana proses partisipasi masyarakat terbentuk dan dijalankan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang

Eco-City, khususnya pada kawasan yang berpotensi mengalami konflik sosial. Selain itu, penelitian ini memperkuat kemampuan analitis peneliti dalam menerapkan kerangka lima proses partisipasi masyarakat menurut David Wilcox (1994), mulai dari pemberian informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, tindakan kolektif, hingga dukungan masyarakat, dalam konteks pembangunan kawasan strategis yang melibatkan interaksi kompleks antara negara, investor, dan masyarakat transmigran.

2. Bagi Instansi Terkait

- a. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat, BP Batam, maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi PSN Rempang *Eco-City* melalui pendekatan pembangunan yang lebih responsif terhadap posisi warga sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak partisipasi pada setiap tahap proses pembangunan;
- b. Menyediakan data dan analisis berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat mendukung penyusunan kebijakan publik, terutama dalam penyelesaian konflik lahan, penguatan komunikasi publik, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat guna meningkatkan legitimasi dan keberterimaan kebijakan pembangunan kawasan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka lima proses partisipasi menurut David Wilcox yang menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi atau manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, tindakan kolektif, serta dukungan terhadap keberlanjutan kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa keberhasilan proyek strategis nasional tidak semata diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari kualitas proses partisipatif, legitimasi sosial, dan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat lokal.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti/Tahun/ Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	Muh Rafi Alfari (2024). <i>Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Bulak Baru Kedung Jepara. Sadar Wisata: Jurnal Pawirisata</i> , Vol. 7 No. 2, 2024.	Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pribumi Desa Bulak Baru sebelum dan sesudah pengelolaan wisata Pantai Bulak Baru oleh pemerintah.	Tangga Partisipasi Arnstein (1969) — model delapan tingkat partisipasi masyarakat: non-partisipasi, partisipasi simbolis, dan partisipasi nyata.	Menunjukkan pergeseran proses partisipasi dari <i>deciding together</i> menuju dominasi <i>information–consultation</i> dalam pembangunan yang dikelola Pemerintah.	Kualitatif deskriptif.	Partisipasi masyarakat awalnya tinggi (derajat kuasa) saat pengelolaan mandiri, namun menurun ke partisipasi semu (tokenism) setelah diambil alih pemerintah. Pengembangan membawa dampak ekonomi positif, tapi partisipasi masyarakat jadi terbatas dan formalitas.
2.	Rachmad Gunawan & Wahyu Subadi (2021) – <i>Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam</i>	Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas publik.	Teori Partisipasi Masyarakat Cohen & Uphoff (1980).	Menunjukkan partisipasi masyarakat dominan pada tahap <i>acting together</i> , namun lemah pada	Kualitatif deskriptif.	Partisipasi masyarakat dominan di tahap pelaksanaan, namun masih lemah di perencanaan.

No .	Peneliti/Tahun/ Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
	<i>Pembangunan Bak Air di Desa Kapar Tabalong, Jurnal Administrasi Publik</i>			<i>deciding together.</i>		
3.	Rahmaniar & Edison (2024) – <i>Analysis of Community Participation in the Development of Dolli Tourism Village, Tukamasea Village, Bantimurung District, Maros Regency.</i> Jurnal: <i>Tourism Destination, Hasanuddin University</i> , Vol. 4(2), 2024.	Menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Dolli Tukamasea di Kabupaten Maros.	Teori Partisipasi Masyarakat Josef Riwu Kaho (2007) — empat bentuk partisipasi: (1) Pengambilan keputusan, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi, (4) Pengambilan manfaat.	Memberikan contoh praktik partisipasi yang relatif utuh dari <i>deciding together</i> hingga <i>supporting community</i> dalam pembangunan kawasan.	Kualitatif deskriptif (observasi, wawancara, dokumentasi).	Partisipasi masyarakat di Desa Wisata Dolli tergolong sangat efektif pada keempat bentuk partisipasi. Masyarakat aktif dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, berperan dalam evaluasi, dan merasakan manfaat ekonomi secara nyata dari pengembangan wisata.
4.	Ayu Wastiti, Hartuti Purnaweni, Amni Zarkasyi Rahman (2020). <i>Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat</i>	Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa	Teori faktor partisipasi masyarakat: kemauan, kemampuan, kesempatan (Slamet dalam Nurbaiti, 2017)	Menjadi rujukan utama dalam menjelaskan faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat	Kualitatif deskriptif (wawancara, observasi, dokumentasi , studi	Faktor pendorong utama partisipasi masyarakat adalah kemauan yang tinggi untuk terlibat dalam perencanaan dan

No .	Peneliti/Tahun/ Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
	<i>Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.</i>	Kumuh (KOTAKU).	serta faktor ekonomi dan demografis sebagai penghambat partisipasi.	yang dapat digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa wisata di kawasan transmigrasi.	pustaka).	sosialisasi program. Faktor penghambat utama adalah kondisi ekonomi (pekerjaan dan penghasilan) yang membatasi waktu serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dana.
5.	Fitriani Lubis (2023) – <i>Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Dolok Pardamean, Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik</i>	Mengkaji peran masyarakat dalam pembangunan desa dan pengaruhnya terhadap efektivitas pembangunan.	Teori Good Governance & Pemberdayaan Masyarakat.	Menunjukkan partisipasi masyarakat kuat pada tahap <i>acting together</i> , namun belum berkembang ke <i>supporting community</i> .	Kualitatif deskriptif.	Masyarakat aktif dalam pelaksanaan fisik, tetapi rendah dalam evaluasi program.
6.	Balqis Nadhifatur Rifdah & Susilo Kusdiwanggo (2024). <i>Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi</i>	Mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata di	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (community participation &	Memberikan pemetaan faktor-faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata,	Systematic Literature Review (SLR).	Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi dukungan pemerintah, keunggulan objek

No .	Peneliti/Tahun/ Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
	<i>Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis</i> . Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Vol. 13 No. 2, 2024.	Indonesia.	sustainable tourism).	sehingga menjadi rujukan untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi dalam penelitian desa wisata.		wisata, peningkatan fasilitas dan infrastruktur, keterlibatan komunitas, serta pendampingan pelatihan.
7.	S. Sunarti, Maya Damayanti, Landung Esariti, Mardwi Rahdriawana, Novia Cecilia Medina (2022). <i>Tantangan Pengembangan Wisata Berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari, Kabupaten Kendal</i> . Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 18 No. 4, 2022.	Menganalisis tantangan pengembangan wisata baru berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat Desa Montongsari.	Tangga Partisipasi Arnstein (1969) serta dinamika partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan wisata.	Menjadi pembanding bagi penelitian kawasan dalam memahami tantangan rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya pada tahap awal seperti informasi dan konsultasi yang selaras dengan teori Wilcox (1994).	Kualitatif deskriptif (wawancara fasilitator FGD dan analisis deskriptif).	Tantangan partisipasi masyarakat muncul karena kurangnya kesadaran akan potensi wisata, kesibukan aktivitas masyarakat, serta minimnya informasi dan perhatian pemerintah. Tahap awal partisipasi masih berada pada tokenism/informing sehingga partisipasi belum optimal.

No .	Peneliti/Tahun/ Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
8.	Mimi Cahayani dkk. (2024) – <i>Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Sukarare, Management Studies and Entrepreneurship Journal</i>	Menganalisis dampak partisipasi masyarakat terhadap peningkatan ekonomi desa wisata.	Community-Based Tourism (CBT).	Menunjukkan peran <i>acting together</i> dan <i>supporting community</i> dalam mendorong manfaat ekonomi partisipasi Masyarakat.	Kualitatif deskriptif.	Partisipasi aktif berpengaruh positif pada pendapatan warga dan pengembangan UMKM lokal.
9.	Putu Widya Darmayanti dkk. (2021) – <i>Partisipasi Masyarakat sebagai Faktor Utama dalam Pengembangan Desa Wisata Kaba-Kaba, Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)</i>	Mengidentifikasi faktor yang memotivasi masyarakat mendukung pengembangan desa wisata.	CBT & Teori Motivasi Sosial (Maslow).	Menunjukkan pentingnya <i>acting together</i> dan <i>supporting community</i> dalam mendorong dukungan Masyarakat.	Mixed Method (analisis faktor).	Faktor partisipasi masyarakat adalah determinan utama dukungan terhadap pengembangan desa wisata.
10.	Rahmat Rafinzar & Mardianto (2023) – <i>Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Pulau Semambu Ogan Ilir, Jurnal Publisitas</i>	Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.	Teori Partisipasi Arnstein & Good Governance.	Menunjukkan partisipasi masyarakat dominan pada tahap <i>information–consultation</i> dalam kerangka David Wilcox.	Kualitatif deskriptif.	Partisipasi masyarakat tinggi di tahap musyawarah, namun rendah dalam tahap implementasi dan evaluasi.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar perbandingan sekaligus pijakan untuk menempatkan posisi penelitian ini dalam perkembangan kajian partisipasi masyarakat. Melalui pemetaan *state of the art*, penelitian-penelitian sebelumnya menjadi rujukan untuk melihat bagaimana konsep partisipasi masyarakat diterapkan dalam konteks pembangunan wilayah dan pengelolaan kawasan. Dengan demikian, kajian terdahulu berperan dalam memperkuat landasan teoritis serta membantu merumuskan arah analisis penelitian ini.

Sejumlah penelitian memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, antara lain studi Gunawan & Subadi (2021) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas publik, Rahmaniar dan Edison (2024) tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Dolli Tukamasea, serta Rafinzar & Mardianto (2023) yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes Pulau Semambu. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan wilayah. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada konteks lokal seperti desa wisata, pembangunan desa, atau fasilitas publik berskala kecil, serta belum menyoroti kompleksitas pembangunan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) pada aspek lokus, konteks, dan pendekatan analisis. Berdasarkan dari sisi lokus dan konteks, penelitian ini mengkaji Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* yang merupakan kawasan strategis nasional dengan karakteristik unik karena menggabungkan fungsi sosial-permukiman transmigrasi dan kepentingan investasi industri dalam skema PSN. Berdasarkan dari sisi teori, penelitian ini menggunakan kerangka lima proses partisipasi masyarakat menurut David Wilcox (1994) yang

menganalisis partisipasi sebagai suatu proses berjenjang mulai dari *information* dan *consultation* hingga *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat berlangsungnya proses partisipasi masyarakat transmigran dalam pembangunan kawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan publik di kawasan transmigrasi yang tengah bertransformasi menjadi kawasan strategis nasional.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik dapat dimaknai sebagai proses institusional yang dijalankan organisasi publik untuk menerapkan kebijakan dan program pembangunan. Administrasi publik berperan memandu sistem pelaksanaan kebijakan agar sejalan dengan tujuan negara dan kepentingan publik. Administrasi publik juga menjadi kerangka untuk memahami relasi kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Berdasarkan konteks penelitian ini, administrasi publik menjadi dasar analisis dalam melihat bagaimana kebijakan transmigrasi dan PSN Rempang *Eco-City* mempengaruhi ruang partisipasi masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi

Paradigma ke-enam yaitu paradigma tata kelola (*governance*), 1990-sekarang. Paradigma ini mencerminkan pendekatan pemerintahan modern yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, seperti masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tata kelola

berfokus pada kolaborasi, partisipasi warga, dan penguatan jaringan dalam penyediaan layanan publik. Tidak seperti NPM yang berorientasi pada efisiensi bisnis, paradigma *governance* menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan solusi kolektif.

Berdasarkan penjelasan paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry tersebut, penelitian “Partisipasi Masyarakat Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*” merupakan cerminan dari pelaksanaan paradigma *governance*. Paradigma *governance* menempatkan proses pengambilan keputusan pembangunan tidak lagi hanya sebagai domain birokrasi formal, tetapi sebagai proses deliberatif yang menuntut partisipasi aktif dari berbagai aktor yang berkepentingan, termasuk masyarakat terdampak. Berfokus di Rempang, orientasi pada konsensus menjadi sangat penting karena proses pembangunan tidak hanya menyangkut pengelolaan instrumen kebijakan, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial atas keputusan negara dalam proyek yang berimplikasi langsung pada ruang hidup masyarakat transmigran. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, komunikasi, negosiasi, dan implementasi kebijakan relokasi serta pengembangan kawasan Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional merupakan indikator praktik *governance* yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan keberterimaan sosial dalam pembangunan publik.

1.6.4 Manajemen Publik

Tabel 1. 4 Tabel Perbandingan Paradigma

Paradigma / Perbedaan	KEBIJAKAN PUBLIK	MANAJEMEN PUBLIK
Tujuan	Harmonisasi pelayanan publik.	Efektivitas dan efisiensi sumber daya.
Sasaran	Pemerintah, masyarakat, dan aktor yang terlibat dalam kebijakan.	Sumber daya (manusia, anggaran, fasilitas, dan IPTEK).
Penerapan	Mekanisme, alur, aksi, dan tindakan pemerintah.	Proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan aktivitas.
Output	Kebijakan sebagai solusi permasalahan masyarakat.	Strategi mengorganisasikan sumber daya.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Stabiti (2023) menjelaskan kembali bahwa manajemen publik merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh organisasi publik dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, menyusun strategi, dan mengevaluasi seluruh sumber daya yang dimiliki. Manajemen publik bertujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dengan mengatur sumber daya dan anggaran agar sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan. Pengaturan sumber daya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga, memerlukan struktur koordinasi yang jelas antar unit pelaksana. Oleh karena itu, manajemen publik menjadi fondasi pelaksanaan pembangunan yang terukur.

Berdasarkan uraian tersebut, manajemen publik pada penelitian ini dipahami sebagai proses pengaturan, koordinasi, dan integrasi aktivitas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Pembangunan Rempang tidak hanya memerlukan instrumen kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan pengaturan sumber daya, pengelolaan aktor, dan koordinasi dengan masyarakat transmigran sebagai

pemangku kepentingan langsung (Pramesti & Prayoga, 2025; Rasyad et al., 2024; Rizal et al., 2018; Wulandari, 2025). Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat transmigran bukan sekadar elemen sosial, tetapi merupakan unsur manajerial yang memastikan pelaksanaan pembangunan kawasan Rempang berjalan efektif, efisien, serta memperoleh legitimasi publik.

1.6.5 Manajemen Partisipatif

Manajemen partisipatif dalam penelitian ini dimaknai sebagai pendekatan pengelolaan kebijakan dan program pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor dimana terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Manajemen partisipatif digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. Adapun dalam penelitian ini, manajemen partisipatif berfungsi untuk menganalisis mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan transmigrasi dan PSN Rempang *Eco-City*. Dengan demikian, manajemen partisipatif menjadi instrumen analitis untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun kontribusi dalam proses pembangunan.

1.6.6 Pemberdayaan Sosial

Ariani dan Rahaju (2023) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mencakup prinsip, yaitu:

1. *Enabling* (Pemungkinan)

Proses ini mengacu pada penciptaan lingkungan dan suasana yang dapat menumbuhkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pada tahap ini dilaksanakan proses perencanaan program yang melibatkan masyarakat, termasuk pemberian motivasi, dorongan, dan pembangkitan kesadaran guna mengembangkan potensi tersebut (Ghozali & Rahaju, 2023). Berdasarkan konteks di Rempang, tahap ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan literasi hukum, dan peningkatan kesadaran warga mengenai hak-hak sosial ekonomi mereka.

2. *Empowering* (Peningkatan Kemampuan)

Proses ini mengacu pada penguatan potensi yang dimiliki masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Langkah yang diambil dapat berupa pemberian input, pelatihan kerja, atau pendampingan usaha agar masyarakat mendapatkan peluang ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks Rempang Eco-City, penguatan ini penting untuk mencegah ketergantungan warga terhadap pihak luar dan mendorong mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

3. *Protecting* (Perlindungan)

Proses ini mengacu pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang lemah dari persaingan yang tidak seimbang (Ghozali & Rahaju, 2023). Sebagai proses terakhir dari pemberdayaan masyarakat, perlindungan ini dilakukan guna mempertahankan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan dan menjamin bahwa masyarakat tidak kehilangan hak-hak sosial dan budayanya akibat pembangunan kawasan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan proses tersebut, berbagai metode pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan. Mardikanto (2019) menjelaskan bahwa terdapat enam metode pemberdayaan berbasis partisipatif, yaitu:

1. *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, yaitu metode observasi lapangan secara langsung guna mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial masyarakat;
2. *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*, yaitu metode penyempurnaan dari RRA dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. *Focus Group Discussion (FGD)*, yaitu forum diskusi terarah yang melibatkan berbagai pihak untuk mengidentifikasi isu-isu utama sesuai tujuan kegiatan
4. *Participatory Learning and Action (PLA)*, yaitu metode yang menitikberatkan pada proses pembelajaran melalui praktek langsung di lapangan;
5. *Farmers Field School (FFS)*, yaitu pertemuan berkala bersama kelompok masyarakat untuk membahas permasalahan dan solusi yang dihadapi;
6. *Pelatihan Partisipatif*, yaitu metode pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat agar kegiatan pemberdayaan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, pemberdayaan sosial masyarakat di Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* dapat diartikan sebagai proses pemberian kekuatan, kemampuan, serta ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mandiri dalam Pembangunan (Akre, 2021; Darmini & Parlindungan,

2024; Indriani, 2021; Mawadzah et al., 2023; Nelly, 2024; Rizal et al., 2024; Yanto et al., 2024). Pemberdayaan sosial menjadikan masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhannya sendiri, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan sosial menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat transmigran yang berdaya, sejahtera, dan adaptif terhadap perubahan di kawasan strategis nasional Rempang *Eco-City*.

1.6.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Slamet (dalam Nurbaiti, 2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Kemauan

Faktor kemauan merupakan sesuatu yang dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan (Wastiti et al., 2020). Faktor ini muncul dari motivasi internal masyarakat yang ingin berpartisipasi secara sukarela karena memiliki rasa percaya terhadap manfaat program tersebut. Berdasarkan konteks Rempang *Eco-City*, kemauan masyarakat untuk terlibat muncul dari harapan akan perbaikan ekonomi dan sosial pasca relokasi, serta keinginan untuk mempertahankan identitas dan hak atas tanah yang mereka miliki.

2. Kemampuan

Faktor kemampuan berkaitan dengan keterampilan dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat terhadap suatu program atau kegiatan (Naisabur & Salsabila, 2025). Kemampuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan

teknis, serta pengalaman yang dapat mendukung masyarakat dalam mengambil peran aktif pada setiap tahapan pembangunan. Berdasarkan konteks Rempang, kemampuan warga untuk memahami informasi kebijakan, mengelola sumber daya ekonomi, serta bernegosiasi dengan pihak pengembang menjadi aspek penting dalam memperkuat partisipasi yang bermakna.

3. Kesempatan

Faktor kesempatan merujuk pada peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan (Poespitoahadi & Fe, 2023). Kesempatan yang luas dapat membentuk solidaritas dan integritas sosial masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Dalam konteks pembangunan kawasan strategis seperti Rempang *Eco-City*, kesempatan partisipasi sering kali ditentukan oleh seberapa terbuka mekanisme konsultasi publik dan sejauh mana masyarakat diberikan akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat yang dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Deviyanti (dalam Irfani, 2024) menjelaskan bahwa faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat meliputi:

1. Campur Tangan *Stakeholder*

Berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dominasi pihak tertentu, terutama pemerintah dan investor, dapat memengaruhi keinginan

masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif (Irfani, 2024). Berdasarkan konteks Rempang *Eco-City*, dominasi pengambil kebijakan dan orientasi investasi yang kuat membuat masyarakat merasa tidak memiliki ruang yang setara dalam proses pembangunan.

2. Usia

Faktor usia dapat berperan sebagai pendorong sekaligus penghambat partisipasi individu dalam kegiatan pembangunan (Wastiti et al., 2020). Individu dengan usia produktif cenderung lebih bersemangat dan memiliki energi untuk berpartisipasi, sedangkan individu dengan usia tidak produktif kurang tertarik atau memiliki keterbatasan fisik untuk terlibat aktif. Pada kasus masyarakat Rempang, kelompok usia muda lebih responsif terhadap program pelatihan dan sosialisasi, sementara kelompok usia lanjut cenderung pasif karena faktor adaptasi dan mobilitas.

3. Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin menjadi salah satu faktor sosial yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Perbedaan peran dan pandangan mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan sering kali menciptakan kesenjangan dalam kesempatan berpartisipasi (Irfani, 2024). Dalam masyarakat transmigran, perempuan kerap memiliki peran domestik yang membatasi keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan publik, meskipun mereka juga terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan.

4. Mata Pencarian

Mata pencarian berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang dimiliki seseorang untuk terlibat dalam kegiatan sosial (Chusnulitta et al., 2025). Masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi dengan pekerjaan utama cenderung tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pertemuan atau kegiatan pembangunan. Berdasarkan konteks Rempang *Eco-City*, warga yang bekerja di sektor informal seringkali kesulitan menghadiri forum konsultasi karena benturan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari.

5. Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam memahami informasi dan urgensi suatu kegiatan (Jayanti, 2023). Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial yang lebih baik, sehingga lebih mudah menerima inovasi dan ikut berpartisipasi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih sulit memahami proses pembangunan yang kompleks dan cenderung bersikap pasif terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Tabel 1. 5 Matriks Gejala Faktor-Faktor yang Berkontribusi dalam Proses Partisipasi Masyarakat Menurut Slamet dalam Nurbati 2017 dan Irfani 2024

FENOMENA	SUB FENOMENA	GEJALA
Faktor-Faktor yang Berkontribusi dalam Proses Partisipasi Masyarakat Kawasan Rempang <i>Eco-City</i>	Faktor Pendorong Faktor pendorong dalam pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i> merupakan dorongan yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Wastiti et al. (2020), faktor ini meliputi kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.	1. Kemauan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang <i>Eco-City</i> .
		2. Kemampuan masyarakat dalam memahami manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan kawasan transmigrasi.
		3. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi melalui dukungan sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang memberi ruang kolaborasi.
	Faktor Penghambat Faktor penghambat dalam pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i> merupakan hambatan yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Irfani (2024), faktor ini mencakup campur tangan <i>stakeholder</i> , perbedaan usia dan jenis kelamin, mata pencaharian, serta tingkat pendidikan yang rendah, sehingga partisipasi masyarakat tidak berjalan optimal.	1. Campur tangan dominan <i>stakeholder</i> , seperti pemerintah dan pengembang, yang membatasi ruang aspirasi serta inisiatif masyarakat.
		2. Perbedaan usia masyarakat yang memengaruhi tingkat partisipasi, di mana kelompok usia produktif lebih aktif dibandingkan usia lanjut.
		3. Perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan masih terbatas.

FENOMENA	SUB FENOMENA	GEJALA
		4. Keterkaitan mata pencaharian masyarakat dengan proyek pembangunan, khususnya kelompok nelayan dan pelaku usaha yang terdampak langsung.
		5. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang membatasi pemahaman mereka terhadap proses pembangunan kawasan transmigrasi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dan penghambat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Optimalisasi faktor pendorong seperti kemauan, kemampuan, dan kesempatan perlu diperkuat melalui peningkatan literasi kebijakan, pelatihan, dan transparansi informasi. Sebaliknya, faktor penghambat seperti dominasi *stakeholder*, keterbatasan pendidikan, dan kesenjangan gender perlu diminimalkan agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara inklusif, sejajar, dan berkelanjutan.

1.6.8 Partisipasi Masyarakat

Teori tingkatan proses partisipasi yang dikemukakan oleh David Wilcox (1994) sebagai berikut:

a. *Information* (Informasi)

Information merupakan tingkatan pertama dalam partisipasi masyarakat. Pada tingkat ini, masyarakat berperan sebagai penerima informasi mengenai rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Partisipasi bersifat satu arah, di mana masyarakat belum memiliki ruang untuk memberikan tanggapan atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pihak pemberi informasi perlu memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi penerima informasi.

b. *Consultation* (Konsultasi)

Consultation merupakan tingkatan kedua dalam partisipasi masyarakat. Pada tingkat ini, masyarakat mulai diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, ide, atau masukan terhadap informasi yang telah diterima sebelumnya. Meskipun demikian, masyarakat belum terlibat secara langsung dalam proses implementasi keputusan. Konsultasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, diskusi, rapat, atau forum pertemuan antara pemangku kepentingan dan masyarakat.

c. *Deciding Together* (Pengambilan Keputusan Bersama)

Deciding Together merupakan tingkatan ketiga dalam partisipasi masyarakat. Pada tingkat ini, masyarakat mulai terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak terkait. Keterlibatan ini mencakup proses pemetaan ide, penyusunan pilihan-pilihan kebijakan, serta perumusan solusi yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Tingkatan ini penting ketika keputusan yang diambil memerlukan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

d. *Acting Together* (Bertindak Bersama)

Acting Together merupakan tingkatan keempat dalam partisipasi masyarakat. Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mewujudkan tujuan kegiatan. Kerja

sama yang terbangun didasarkan pada kesamaan visi, kepercayaan, dan komitmen untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

e. *Supporting Community* (Dukungan terhadap Komunitas)

Supporting Community merupakan tingkatan kelima dalam partisipasi masyarakat. Pada tingkat ini, partisipasi masyarakat berkembang ke arah pemberian dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan yang telah berjalan. Dukungan dapat berupa pendanaan, penyediaan sumber daya, pemberian nasihat, maupun bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk memperkuat agenda dan kegiatan komunitas yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan teori tingkatan partisipasi masyarakat David Wilcox (1994), partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai proses keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan transmigrasi Rempang *Eco-City* pada berbagai tingkat. Tingkatan tersebut meliputi penerimaan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan kegiatan, hingga dukungan terhadap keberlanjutan program pembangunan. Konsep ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana masyarakat terdampak dilibatkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini juga menganalisis bentuk, intensitas, dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan kebijakan Rempang *Eco-City*

Tabel 1. 6 Matriks Gejala Partisipasi Masyarakat Menurut David Wilcox

FENOMENA	SUB FENOMENA	GEJALA
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i>	Information (Informasi) Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rencana atau kegiatan, di mana masyarakat berperan sebagai penerima informasi dalam proses komunikasi yang bersifat satu arah dan belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan.	1. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rencana atau kegiatan melalui sosialisasi atau pengumuman yang bersifat satu arah.
		2. Peran masyarakat terbatas sebagai penerima informasi tanpa adanya ruang diskusi atau tanggapan dalam proses penyampaian informasi.
		3. Masyarakat belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap penyampaian informasi tersebut.
	Consultation (Konsultasi) Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, ide, atau masukan terhadap informasi mengenai rencana atau kegiatan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi, seperti survei, diskusi, rapat, atau forum pertemuan, tanpa keterlibatan langsung dalam proses implementasi keputusan.	1. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, ide, atau masukan terhadap rencana atau kegiatan melalui survei, diskusi, rapat, atau forum pertemuan.
		2. Masukan masyarakat dihimpun sebagai bahan pertimbangan oleh pihak terkait tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi keputusan.

FENOMENA	SUB FENOMENA	GEJALA
		3. Keterlibatan masyarakat terbatas pada tahap konsultasi dan belum sampai pada pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan akhir.
	<i>Deciding Together (Pengambilan Keputusan Bersama)</i> Keterlibatan aktif masyarakat bersama pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang mencakup pemetaan ide, penyusunan pilihan-pilihan kebijakan, serta perumusan solusi yang disepakati secara bersama.	1. Keterlibatan masyarakat bersama pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan melalui pemetaan ide dan pembahasan alternatif solusi.
		2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan pilihan-pilihan kebijakan yang dibahas dan disepakati secara bersama.
		3. Adanya kesepakatan bersama antara masyarakat dan pihak terkait sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan.
	<i>Acting Together (Bertindak Bersama)</i> Keterlibatan aktif masyarakat bersama pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan di mana masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga menjalankan peran dan tanggung jawab yang jelas secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kegiatan.	1. Keterlibatan masyarakat bersama pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang telah disepakati.
		2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak terkait sebagai tindak lanjut dari perencanaan dan pengambilan keputusan.

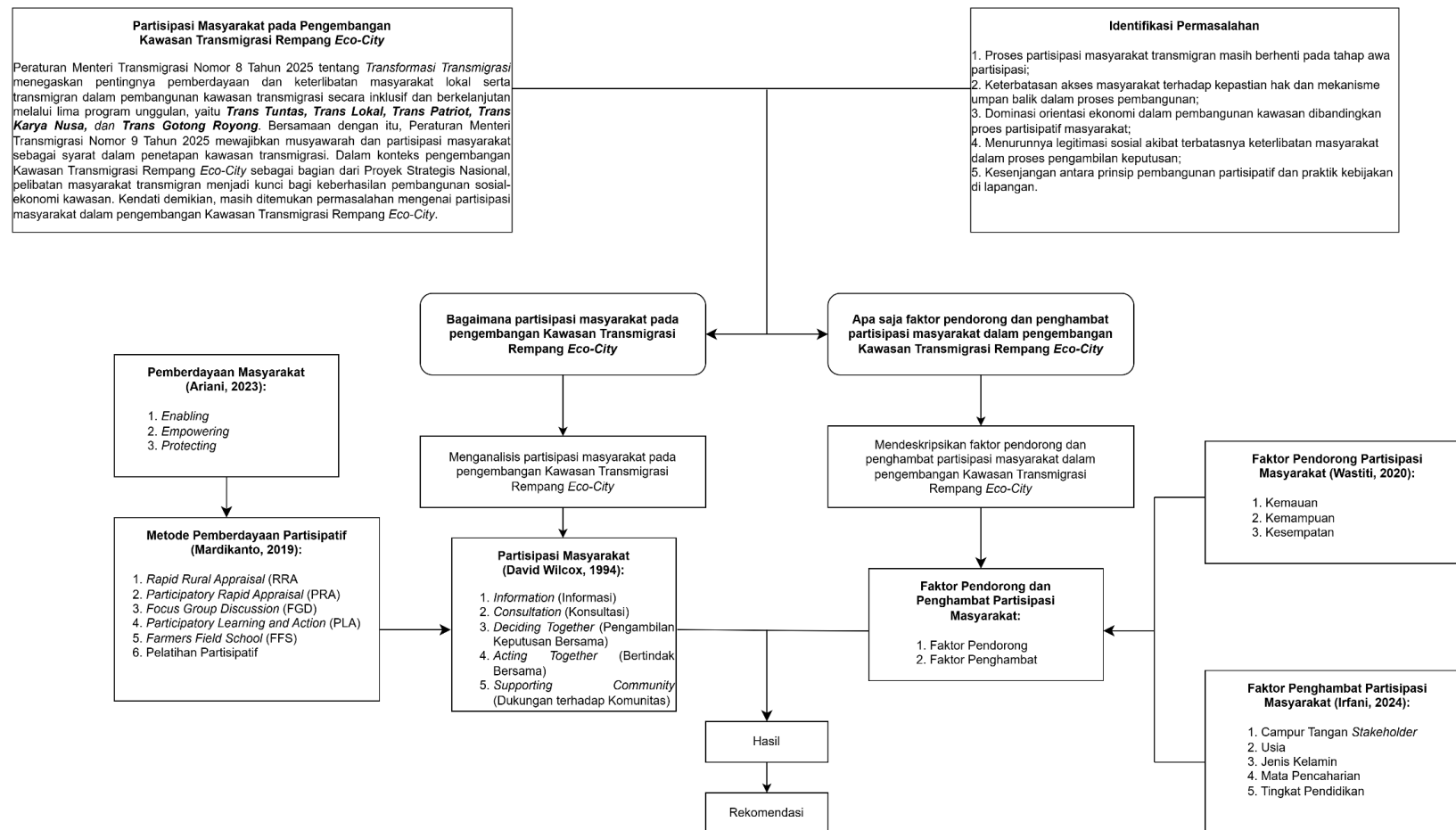
FENOMENA	SUB FENOMENA	GEJALA
		3. Adanya pembagian peran yang jelas antara masyarakat dan pihak terkait dalam mencapai tujuan kegiatan.
	<i>Supporting Community (Dukungan terhadap Komunitas)</i> Pemberian dukungan oleh masyarakat dan pihak terkait terhadap keberlanjutan kegiatan yang telah disepakati bersama, baik dalam bentuk pendanaan, penyediaan sumber daya, pemberian nasihat, maupun bentuk dukungan lain yang diperlukan untuk memperkuat agenda dan kegiatan komunitas.	1. Pemberian dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan komunitas dalam bentuk pendanaan, penyediaan sumber daya, atau fasilitas yang dibutuhkan.
		2. Keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam memberikan nasihat, pendampingan, atau dukungan non-materi untuk memperkuat agenda kegiatan komunitas.
		3. Adanya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan memperkuat kegiatan komunitas yang telah disepakati bersama.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan berbagai definisi dan gejala yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu maupun kelompok, baik dalam bentuk fisik, materi, mental, maupun emosional yang memberikan kontribusi untuk mendukung pelaksanaan program maupun pengambilan keputusan. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan pencapaian target program serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan program sekaligus memperkuat manfaat yang dirasakan seluruh anggota masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat aktif, tetapi juga strategis dalam mencapai tujuan bersama.

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan transmigrasi Rempang *Eco-City* dalam penelitian ini dipahami sebagai proses tingkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan yang mencerminkan derajat pengaruh dan peran masyarakat terhadap kegiatan, keputusan, serta keberlanjutan program pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan teori tingkatan partisipasi masyarakat David Wilcox yang memandang partisipasi sebagai proses bertahap dari keterlibatan yang bersifat pasif hingga keterlibatan yang bersifat aktif dan berkelanjutan. Penggunaan teori David Wilcox relevan dalam penelitian ini yaitu tentang pengembangan Rempang *Eco-City* karena proses pembangunan kawasan tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga menuntut adanya konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif, serta dukungan terhadap keberlanjutan agenda komunitas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai spektrum keterlibatan yang menunjukkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan kawasan transmigrasi (Mannayong & Faisal, 2024; Naisabur & Salsabila, 2025).

Berdasarkan teori David Wilcox (1994), partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut:

1. *Information* (Informasi)

Information merupakan tingkatan awal partisipasi masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai penerima informasi mengenai rencana atau kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi Rempang *Eco-City*. Pada tingkat ini, proses komunikasi bersifat satu arah, dan masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi disampaikan oleh pemerintah atau pihak pengembang dengan tujuan memberikan pemahaman awal terkait program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. *Consultation* (Konsultasi)

Consultation merupakan tingkatan partisipasi di mana masyarakat mulai diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, ide, atau masukan terhadap informasi yang telah diterima sebelumnya. Keterlibatan ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi, seperti survei, diskusi, rapat, atau forum pertemuan. Meskipun demikian, pada tingkat ini masyarakat belum terlibat secara langsung dalam implementasi keputusan, dan masukan yang diberikan bersifat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait.

3. *Deciding Together* (Pengambilan Keputusan Bersama)

Deciding Together merupakan tingkatan partisipasi di mana masyarakat terlibat secara aktif bersama pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan pengembangan kawasan Rempang *Eco-City*. Keterlibatan ini mencakup pemetaan ide, penyusunan pilihan-pilihan kebijakan, serta perumusan solusi yang disepakati secara bersama. Pada

tingkat ini, keputusan yang dihasilkan mencerminkan hasil dialog dan kesepakatan antara masyarakat dan pemangku kepentingan.

4. *Acting Together* (Bertindak Bersama)

Acting Together merupakan tingkatan partisipasi di mana masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan pihak terkait. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Rempang *Eco-City*. Kerja sama ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah disepakati.

5. *Supporting Community* (Dukungan terhadap Komunitas)

Supporting Community merupakan tingkatan partisipasi tertinggi, di mana partisipasi masyarakat berkembang ke arah pemberian dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan komunitas yang telah berjalan. Dukungan tersebut dapat berupa pendanaan, penyediaan sumber daya, pemberian nasihat, pendampingan, maupun bentuk dukungan lain yang diperlukan untuk memperkuat agenda dan kegiatan komunitas dalam pengembangan kawasan Rempang *Eco-City*.

1.7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan penduduk atau masyarakat pada segala kegiatan mulai dari tahap identifikasi permasalahan hingga evaluasi pelaksanaan keputusan. Segala proses tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong adalah faktor yang bersifat positif dan

berhubungan dengan kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* yang pada akhirnya membuat mereka termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan. Faktor penghambat adalah kondisi yang bersifat negatif dan berhubungan dengan hal-hal yang dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi secara optimal pada setiap tahapan kegiatan pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

1.8 Argumen Penelitian

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan warga dalam suatu program atau kegiatan pembangunan yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki peran dan pengaruh dalam proses pembangunan tersebut. Penelitian ini meneliti tentang pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, dimana partisipasi masyarakat menjadi penting karena pembangunan kawasan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penerimaan masyarakat terhadap arah pembangunan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan teori tingkatan partisipasi masyarakat David Wilcox yang memandang partisipasi sebagai proses bertahap, mulai dari keterlibatan yang bersifat pasif hingga aktif dan berkelanjutan. Tingkatan partisipasi tersebut meliputi *Information*, *Consultation*, *Deciding Together*, *Acting Together*, dan *Supporting Community*. Kerangka ini digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, baik dalam penerimaan informasi, penyampaian masukan,

pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan kegiatan, hingga dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan komunitas.

Secara normatif, Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan transmigrasi melalui musyawarah dan pemberdayaan masyarakat lokal maupun transmigran. Penelitian tentang pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* ini, sebagian masyarakat telah menunjukkan keterlibatan awal, termasuk kesediaan untuk menempati dan beradaptasi dengan kawasan pembangunan. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, partisipasi masyarakat masih lebih dominan berada pada tingkat *Information dan Consultation*, sementara keterlibatan pada tingkat pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan kolaboratif, dan dukungan terhadap keberlanjutan komunitas belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* menggunakan kerangka teori David Wilcox (1994), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat menuju tingkat yang lebih tinggi.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, dengan tujuan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari masyarakat, perilaku, serta

kondisi yang dapat diamati secara langsung. Penelitian kualitatif berupaya menjelaskan data yang berkaitan dengan situasi atau permasalahan yang ada, seperti ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan rencana, konflik antara dua situasi atau lebih, maupun kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperjelas fakta serta mengungkap keadaan yang sesungguhnya di lapangan, khususnya dalam mengkaji lebih dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami situasi sosial yang berkaitan dengan fenomena partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Pendekatan ini diterapkan untuk meneliti kondisi alamiah, dimana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2013). Pendekatan kualitatif berusaha menggambarkan realitas sosial secara menyeluruh tanpa adanya intervensi eksperimental. Menurut Moleong (2017), pendekatan ini tidak mengandalkan prosedur statistik, melainkan menggunakan analisis naratif yang bersifat deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan objek sesuai dengan kondisi sebenarnya (Arikunto, 2013). Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena sosial berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut meliputi aktivitas, karakteristik, serta hubungan sosial yang terjadi di antara individu maupun kelompok (Iskandar, 2010). Melalui penelitian

deskriptif, peneliti dapat menyajikan data empiris yang menjelaskan kondisi partisipasi masyarakat dalam konteks sosialnya.

Kemudian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat berdasarkan kondisi faktual di lapangan tanpa adanya intervensi terhadap data. Analisis dilakukan dengan menguraikan bentuk dan dinamika partisipasi masyarakat berdasarkan tingkatan partisipasi yang meliputi *Information*, *Consultation*, *Deciding Together*, *Acting Together*, dan *Supporting Community*. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan menggunakan teori partisipasi masyarakat David Wilcox guna memahami sejauh mana keterlibatan masyarakat berkembang dari peran sebagai penerima informasi hingga dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan komunitas dalam pengembangan kawasan transmigrasi

1.9.2 Situs Penelitian

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa lokus penelitian adalah tempat di mana suatu fenomena sosial akan diteliti secara langsung. Penentuan lokus dilakukan agar peneliti dapat memahami situasi nyata di lapangan dan menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat berdasarkan konteks wilayah. Penelitian ini mengambil lokus pada Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* yang berada di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini dipilih karena menjadi salah satu wilayah yang sedang mengalami proses pengembangan

besar dan melibatkan interaksi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat lokal.

1.9.3 Subjek Penelitian

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* merupakan proses pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria informasi yang diinginkan dalam melaksanakan penelitian. Pemilihan *purposive sampling* dalam penelitian ini didasari oleh kepemilikan informasi yang mendalam mengenai pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* dan dinamika partisipasi masyarakat yang hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung. Beberapa di antaranya terbagi menjadi tiga kelompok informan, yaitu informan kunci, informan primer, dan informan sekunder.

Uraian mengenai informan pada penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*” adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci

a. Badan Pengusahaan (BP) Batam.

BP Batam dipilih sebagai informan karena berperan dominan *pada tahap Information dan Consultation* dalam proses partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh David Wilcox. Lembaga ini bertanggung jawab dalam penyediaan informasi, sosialisasi kebijakan, serta pembukaan ruang konsultasi antara

pemerintah, investor, dan masyarakat terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang *Eco-City*.

- b. Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* dipilih sebagai informan karena berperan pada *tahap Deciding Together* dan *Acting Together* dalam proses partisipasi masyarakat menurut David Wilcox. Satuan kerja ini terlibat langsung dalam pengambilan keputusan teknis serta pelaksanaan program pembangunan dan relokasi, termasuk fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan kawasan.

2. Informan Primer

- a. Tokoh Masyarakat di Rempang *Eco-City*.

Tokoh masyarakat dipilih sebagai informan karena berperan pada *tahap Consultation* dan *Deciding Together* dalam proses partisipasi masyarakat menurut David Wilcox. Tokoh masyarakat menjadi penyambung aspirasi warga kepada pemerintah serta pihak terkait, sekaligus berperan dalam menjaga nilai sosial budaya dan memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pembangunan kawasan.

- b. Kelompok Nelayan Transmigran Lokal Rempang *Eco-City*.

Kelompok nelayan transmigran dipilih sebagai informan karena mewakili masyarakat yang mengalami relokasi dan berpartisipasi pada tahap *Acting Together*. Informan ini memberikan informasi mengenai adaptasi mata pencaharian, keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang terdampak relokasi.

c. Masyarakat Transmigran Lokal Rempang *Eco-City*.

Masyarakat transmigran dipilih sebagai informan karena berperan pada tahap *Information* hingga *Supporting Community* dalam proses partisipasi masyarakat. Informan ini digunakan untuk menilai tingkat penerimaan informasi, keterlibatan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, serta mengidentifikasi hambatan partisipasi seperti keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan, dan kesempatan berpartisipasi.

3. Informan Sekunder

Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Akademisi dipilih sebagai informan sekunder untuk memberikan pandangan analitis dan objektif terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Informan ini berperan dalam memperkuat interpretasi temuan lapangan berdasarkan teori partisipasi masyarakat David Wilcox, tanpa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan kawasan.

Tabel 1. 7 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Informan
1.	Badan Pengusahaan (BP) Batam	1
2.	Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang <i>Eco-City</i>	1
3.	Tokoh Masyarakat di Rempang <i>Eco-City</i>	1
4.	Kelompok Nelayan transmigran lokal Rempang <i>Eco-City</i>	1
5.	Masyarakat transmigran lokal Rempang <i>Eco-City</i>	1
6.	Akademisi	1
Total		6

Keterangan:

1. Badan Pengusahaan (BP) Batam
2. Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rempang
4. Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan transmigran lokal Rempang *Eco-City*
5. Masyarakat transmigran lokal Rempang *Eco-City*
6. Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji

1.9.4 Jenis Data

Sugiyono (2022) mengklasifikasikan data penelitian menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang dapat diukur dan dihitung, sedangkan data kualitatif berupa informasi dalam bentuk kalimat, gambar, atau simbol yang tidak bersifat numerik. Dalam

penelitian ini, digunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data kualitatif tersebut dimanfaatkan untuk memahami secara menyeluruh fenomena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Adapun jenis-jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tertulis, mencakup berbagai dokumen seperti kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait transmigrasi dan pengembangan kawasan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian.
- b. Data gambar, berupa dokumentasi foto yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di sekitar Kawasan Rempang *Eco-City*, yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses analisis data.
- c. Data statistik, meliputi tabel, grafik, dan diagram yang menyajikan informasi pendukung mengenai profil masyarakat, peta wilayah, serta data pembangunan kawasan.
- d. Kata-kata dan tindakan informan, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, primer, dan sekunder. Data ini juga mencakup hasil observasi langsung terhadap aktivitas masyarakat serta interaksi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam proses pengembangan Kawasan Rempang *Eco-City*.

1.9.5 Sumber Data

Arikunto (2013) menjelaskan bahwa sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data memiliki peranan penting karena menentukan keakuratan dan kedalaman hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2022), sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui kegiatan lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, serta diskusi dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang berperan dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, antara lain Badan Pengusahaan (BP) Batam, Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, tokoh masyarakat, nelayan, masyarakat transmigran lokal, serta akademisi. Data tersebut dimanfaatkan untuk menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, namun tetap memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen dan arsip dari lembaga pemerintah, laporan resmi BP Batam, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan dari media massa yang membahas proyek Rempang *Eco-City*. Selain itu, studi kepustakaan juga dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan transmigrasi, pembangunan kawasan, dan partisipasi masyarakat.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022), teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data perlu disesuaikan dengan jenis data serta pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari narasumber (Sugiyono, 2022). Teknik ini dilakukan melalui komunikasi dua arah antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan kunci, primer, dan sekunder yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keterlibatan, serta persepsi masyarakat terhadap dampak pembangunan kawasan, selaras dengan kerangka teori partisipasi masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Sugiyono (2022) menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik individu maupun fenomena sosial. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan kawasan. Peneliti mengamati aktivitas masyarakat, interaksi antara warga dengan pihak pengembang, serta dinamika sosial di sekitar wilayah Rempang *Eco-City*. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat temuan wawancara dan mendukung analisis kualitatif yang dilakukan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut mencakup hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta berita dari media massa yang membahas proyek Rempang *Eco-City*. Teknik ini

berfungsi untuk memperkuat analisis mengenai partisipasi masyarakat, faktor sosial-ekonomi, serta kebijakan pembangunan kawasan. Selain itu, literatur akademik juga dimanfaatkan untuk memahami teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk foto, video, laporan kegiatan, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan proyek Rempang *Eco-City*. Dokumentasi ini berperan dalam menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan kawasan. Data dokumentatif digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, serta menjadi bukti visual yang mendukung validitas temuan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Moleong (2017) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan makna yang dapat dianalisis lebih lanjut. Proses analisis data dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh dari lapangan dapat disusun menjadi temuan penelitian yang bermakna. Analisis data juga membantu peneliti memahami keterkaitan antara fenomena sosial dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022), analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, serta dikelompokkan agar selaras dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat, faktor pendorong, serta faktor penghambat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*. Hasil dari proses reduksi ini menjadi dasar dalam pembentukan pola dan tema untuk analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai temuan lapangan serta hubungan antar kategori data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam yang menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, interaksi antar aktor (pemerintah, masyarakat, dan pengembang), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Rempang. Penyajian data yang terstruktur membantu peneliti mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan sebagai landasan analisis.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis terhadap informasi yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses verifikasi ini bertujuan untuk menjamin keakuratan serta konsistensi informasi. Kesimpulan akhir kemudian disusun berdasarkan data yang telah terverifikasi secara valid, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

1.9.8 Kualitas dan Validitas Data

Moleong (2017) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria utama dalam pengujian keabsahan data yang memengaruhi kualitas hasil penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) *Credibility*, yaitu pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan; (2) *Transferability*, yakni sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa; (3) *Dependability*, yaitu konsistensi atau kestabilan data yang diperoleh melalui proses pemeriksaan berulang; dan (4) *Confirmability*, yakni tingkat sejauh mana temuan penelitian dapat dikonfirmasi dengan bukti yang valid dan dapat dipercaya. Penelitian ini menerapkan keempat prinsip tersebut untuk

menjamin keabsahan data yang diperoleh di lapangan, khususnya dalam mengkaji partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*.

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda guna memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dari sejumlah informan agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber melibatkan berbagai pihak, antara lain instansi pemerintah (BP Batam, Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City*, tokoh masyarakat, nelayan, masyarakat transmigran lokal, serta akademisi. Selanjutnya, dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memastikan konsistensi serta kebenaran data mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan kawasan.